

## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- Notonegoro, (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William. N. (2005). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: UGM Press.
- Gosita, A. (n.d.). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo 2017.
- Juliansyah. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono, (2013), *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Tayibnapi, Y. F. (2018). *Evaluasi Program Dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan Dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Departemen Sosial RI. (2005). *Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Dalam Panti*. Jakarta: Departemen Social RI.
- Buku Profil Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2023
- Buku Laporan Akuntabilitas Linerja Intansi Pemerintah Kota Tanjungpinang Dinas Sosial Tahun 2019
- Hartono, J. (2018). *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Andi.
- Suyanto Bagong. (2013) *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono, (2012), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Harsono, Hanifah. (2002), *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta:Grafindo Jaya.

## ARTIKEL JURNAL ILMIAH DAN SKRIPSI

- Apid, A. (2020). Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Fiqih Siyasa Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Skripsi*, 33.
- Ayu Isrovani Pratiwi, S. Z. (2017). Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 7.
- Desvyati, R. (2017). Penerapan Indikator Kota Layak Anak Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Hukum*, Volume 2, Number1.
- Ekawati, Y. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Jalanan Oleh Pemerintah Kota Pontianak. *Jurnal Hukum*, 5.
- Fesdyanda, D. A. (2017). Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Setara Semarang. *Skripsi*, Jurnal Administrasi Publik.
- Fitriani, R. (2017). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum*, Volume 11, Nomor 2.
- Harefa, F. S. (2017). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan. *Skripsi*, 20.
- Kurniati, H. (2019). Pelaksanaan Kota Layak Anak Di Kota Tanjungpinang. *Naskah Publikasi*, 6-7.
- Maemunah. (2019). Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum*, Vol.34 No 2.
- Melira, R. (2017). Perlindungan Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Padang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum*, Vol.9 No 1.
- Rahman, I. A. (2019). Evaluasi Program Pemberdayaan Anak Jalanan Di Yayasan Bina Anak Pertiwi Pasar Minggu Jakarta Selatan. *Skripsi*, 91.
- Rambulangi, G. F. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Program Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Samarinda. *Jurnal Sosiologi*, Volume 7, Nomor 2.

Rifai, A. H. (2018). Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen. *Skripsi*, 21-22.

Sagita, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Di Dinas Sosiak Kota Jambi). *Skripsi*, 60.

Sholamita, I. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kota Medan. *Skripsi*, 18.

Utama, S. A. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Di Dp3appkb Provinsi Bengkulu). *Skripsi*, 24.

## **PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Permensos RI. (2018). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. 1-33.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2019